

# PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KERUANGAN: PERWUJUDAN DAN KOMUNIKASI ANTAR KEPENTINGAN DALAM PEMANFAATAN LAHAN

Oleh :

**G.A.M.Suartika**

Dosen Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Udayana

## ABSTRAK

*Belum hilang dari ingatan bagaimana proyek reklamasi pantai Padang Galak Sanur, pembangunan Bali Nirwana Resort (BNR), Garuda Wisnu Kencana (GWK), akuisisi lahan di Desa Selasih Puhu untuk lapangan golf, eksistensi hutan Bakau Suwung yang semakin menyusut, penolakan masyarakat Kuta terhadap proyek saluran limbah yang lebih dikenal dg nama DSDP, masalah persampahan dan tingginya pencemaran sepanjang perairan di Bali, telah menimbulkan polemik sekaligus keprihatinan akan keberlangsungan lingkungan fisik dan sosial di Bali (Supartha 1998, Suartika 2005b). Belum pula surut, terjadi lagi pembabatan hutan lindung guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), Geothermal Bedugul. Bapak I Nyoman Gelebet MSi. secara definitif menyatakan PLTP adalah proyek dengan tiga cacat: hukum, sosial dan lingkungan. Pandangan pesimis juga dilontarkan oleh Ibu Ida Ayu Mas (Bali Post, 22/08/05) salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menganggap PLTP ini sebagai tindakan non-konduktif terhadap lingkungan. Ibu Mas lebih lanjut mendiskripsikan, ketakutan akan kepetengan, lebih pada wujud aspirasi pelaku-pelaku bisnis pariwisata yang tidak menginginkan turis meraba-raba di gulitannya malam tanpa secercah sinar penerang.*

*Artikel ini menyimak pendekatan konseptual dengan mengintegrasikan kelompok kepentingan dalam pembangunan yang beragam dan kompleks, dikaitkan dengan eksistensi keruangan yang terbatas. Pendekatan yang dirumuskan diposisikan dalam kerangka berpikir keberadaan ruang, lahan dalam hal ini, yang di satu pihak adalah wujud fisik pendukung praktek-praktek budaya keruangan atau territorial cultural practices (Hall, 1973), sedangkan di pihak lain adalah faktor produksi yang definite. Pemanfaatannya harus diatur jika pembangunan diopsikan sebagai metode menjamin hak setiap komponen kepentingan untuk memperoleh akses yang adil dan proporsional: salah satu kunci pendukung pembangunan yang berkeimbangan, equilibrium, sekaligus menyeluruh dan berkesinambungan, holistik & sustainable. Tulisan ini memiliki latar belakang kontekstual berupa wujud-wujud pembangunan yang terjadi di Pulau Dewata yang tidak bisa dipisahkan dari industri pariwisata, dan sekaligus kepentingan menjaga keberlangsungan lingkungan fisik dan sosial jika sektor pariwisata dan sektor lainnya hendak dipertahankan.*

**Kata Kunci:** keruangan, kepentingan, lahan.

## PARIWISATA DAN PERGESERAN STRUKTUR LINGKUNGAN SOSIAL DAN FISIK

Bali sampai pada detik ini identik dengan dunia industri pariwisata. Dengan etikat menyelamatkan ekonomi negara pasca penjajahan, pemerintah pusat Jakarta (Bappenas) mencanangkan Bali sebagai pusat pariwisata di Indonesia di awal tahun 70an, dalam hal ini

pemerintah perannya sebagai *initiator* sekaligus *negotiator* (Magdoff, 1972). Hal ini memungkinkan dengan diberlakukannya praktek-praktek sistem pemerintahan terpusat dengan dalih menjaga makna integrasi nasional menuju keutuhan kesatuan negara. Dengan mengesampingkan partisipasi komponen-komponen lokal yang paham lingkungan sosial dan fisik Pulau Dewata, konsultan luar negeri – SCETO, diterbangkan dari Prancis untuk

menyusun *master plan* pembangunan pariwisata Bali. Pembangunan kawasan Nusa Dua lengkap dengan By Pass Sanur, termasuk pembangunan beragam *stop over* di berbagai daerah, adalah beberapa contoh realisasi fisik dari *master plan* yang diproduksi konsultan dari negara Prancis, memiliki kota tanpa *high rise building* serta bangga akan kebudayaannya. Perusahaan dan penanam modal nasional atau nasional-*internasional joint venture* diundang, dan partisipasinya disambut luas, dengan penuh harapan, dan lapang hati sebagai partner pemerintah dalam pembangunan. Slogan memasyarakatkan pariwisata dan mempariwastakan masyarakatpun menjadi deretan kata-kata terpampang disetiap sudut kota dan desa. Jika diambil secara acak, bisa dipastikan tak ada satu *krama adat*-pun yang paham benar arti dan makna slogan ini, termasuk aparat pemerintah itu sendiri?

*Lukratif image* dunia pariwisata menarik perhatian berbagai pihak. Pemerintah menginginkan devisa sebesar-besarnya. Pemilik modal bergelut memanfaatkan faktor-faktor produksi yang ada dalam usaha memaksimalkan keuntungan. Masyarakat umum juga tidak mau terlambat dalam ikut berpartisipasi mencari peluang ekonomi dalam industri ini untuk meningkatkan situasi finansial keluarga. Dengan mengadopsi konsep pasar dalam kerangka ekonomi kapitalis industri pariwisatapun bergerak ke arah *mass-tourism*, didominasi para konglomerat berasal dari luar Bali dengan investor berbasis di Jakarta pada peringkat teratas (Aditjondro, 1995). Sementara kedudukan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja yang ada adalah mendukung produksi keuntungan (*profit*) dari *mass-tourism*. Pertanyaan disini adalah, siapa yang memperoleh keuntungan maksimum dari proses produksi semacam ini?

Lokal *subsistence* yang awalnya bersandar pada sektor pertanian, *feasibility*-nya semakin menurun. Promosi sektor pertanian dan insentif pemerintah untuk menyeimbangkan income petani dan pendapatan dari sektor lain hampir nol. Konsekuensinya, daya saing pertanian jauh di bawah sektor servis yang ditawarkan *tourism*. Ketertarikan sumber daya manusia bergerak di bidang pertanian semakin menurun. Sekelompok petani tergeliat ditawarkan sekian jumlah rupiah (dalam mimpipun si petani tidak pernah melihat

uang sebanyak itu) untuk melepas lahan pertanian mereka. Di kelompok lain, petani terpaksa menjual sepetak sawah (satu-satunya) peninggalan leluhur ke investor karena saluran irigasi untuk mengairi sawah sudah tidak memungkinkan lagi. Investor yang sama telah dengan lihai membeli lahan di kiri, kanan, (bahkan depan dan belakang) dan mengalih fungsikannya menjadi vila mewah. Dengan tidak mengesampingkan kontribusi positif dari pariwisata, sebagai pengadaan lapangan dan kesempatan kerja, peningkatan *income* per kapita, pajak dan devisa bagi negara (Mathieson dan Wall 1982, Mitchell 1995, MacRae 1992), mengkonsentrasikan semua usaha hanya untuk memajukan sektor ini, dan minimnya atau bahkan absennya tindakan holistik yang membangun sektor potensial lainnya telah menciptakan ketergantungan "*dependency*."

Bisa dibuktikan bagaimana ekonomi Bali terpuruk ke dua angka dibawah nol pasca Bom-Bali di Kuta, bulan Oktober 2002 lalu. Gagasan dan kampanye Presiden Megawati Soekarnoputri memperbaiki keadaan ekonomi dengan kembali ke sawah tidak *feasible*. Lahan persawahan yang telah menyusut, terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya studi keilmuan bertujuan meningkatkan produksi pertanian (tentunya studi yang tidak hanya berfokus pada intensifikasi pestisida dan pupuk kimia, seperti yang ditawarkan pemerintahan presiden Suharto (Ricklefs 2001)), tidak bisa dipecahkan dalam sekejap.

Tidak hanya ekonomi yang langsung dipengaruhi oleh kondisi ketergantungan ini. Beban lingkungan fisik dan sosial di masyarakat pada banyak kesempatan juga diadaptasikan untuk mendukung usaha pariwisata. Contoh beban fisik, sektor pariwisata menunjukkan kontribusi relatif besar dalam penguasaan dan pemanfaatan lahan untuk pembangunan fasilitas kepariwisataan. Nilai ekonomi lahan meningkat secara signifikan pada level yang sangat sulit dijangkau masyarakat kebanyakan. Sementara itu, kebutuhan keruangan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan prasarana fisik dan sosial di masyarakat juga tidak terelakan. Jumlah penduduk yang membludak karena faktor kelahiran dan melonjaknya statistik pendatang dari berbagai daerah di Nusantara, khususnya

Jawa mengakibatkan peningkatan kebutuhan territorial yang berkelanjutan dan mau tidak mau harus diantisipasi. Contoh dampak sosial, adanya eliminasi ruang-ruang yang memiliki nilai budaya (*form of culture*) dan interupsi terhadap praktek praktek budaya (*cultural practices*) berkaitan dg budaya keruangan, penguasaan daerah pantai untuk kawasan wisata dan pembatasan akses umum serta relokasi Pura Segara. Keadaan-keadaan diatas berkonsekuensi pada pergeseran makna, wujud dan praktek kebudayaan, serta struktur hubungan sosial di masyarakat.

Dari beberapa contoh diatas, bisa diprediksi bahwa pembangunan di Bali dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Kealfaan mengidentifikasi dan menindak lanjuti kekompleksitas ini serta kecenderungan mengedepankan sektor pavorit (tourism) merupakan akar terjadinya lingkungan yang tidak seimbang dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Beragamnya kepentingan, meningkatkan pendapatan dari segi ekonomi, mengkonservasi kebudayaan, mempertahankan kualitas lingkungan, serta meningkatnya intensitas masing-masing kepentingan, sudah menjadi keharusan diciptakannya suatu mekanisme perencanaan yang merangkul komponen-komponen kepentingan yang ada, termasuk pemerintah, kaum ahli, golongan elite dan konglomerat, dan masyarakat kebanyakan (Suartika 2005a, 2005b). Jika tidak, hanya dalam hitungan waktu pulau yang suatu saat pernah dijuluki sebagai '*Pulau Taman*' akan menuju ke suatu titik, dimana segalanya berlalu tanpa bisa diperbaiki dan diraih kembali "*point of no return.*"

### **KOMPLEKSITAS KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN AKAN LAHAN**

Secara alami setiap kepentingan di masyarakat memiliki karakteristik berbeda-beda dan karenanya memiliki potensi tinggi memunculkan konflik. Setiap kelompok interest akan berusaha memenangkan tujuannya masing-masing sehingga persaingan, kompetisi, antar kelompok secara logika bukan hal yang baru. Fokus bahasan pada pendekatan konseptual dalam penanganan masalah keruangan dan pemanfaatannya, ada tiga tindakan substansial

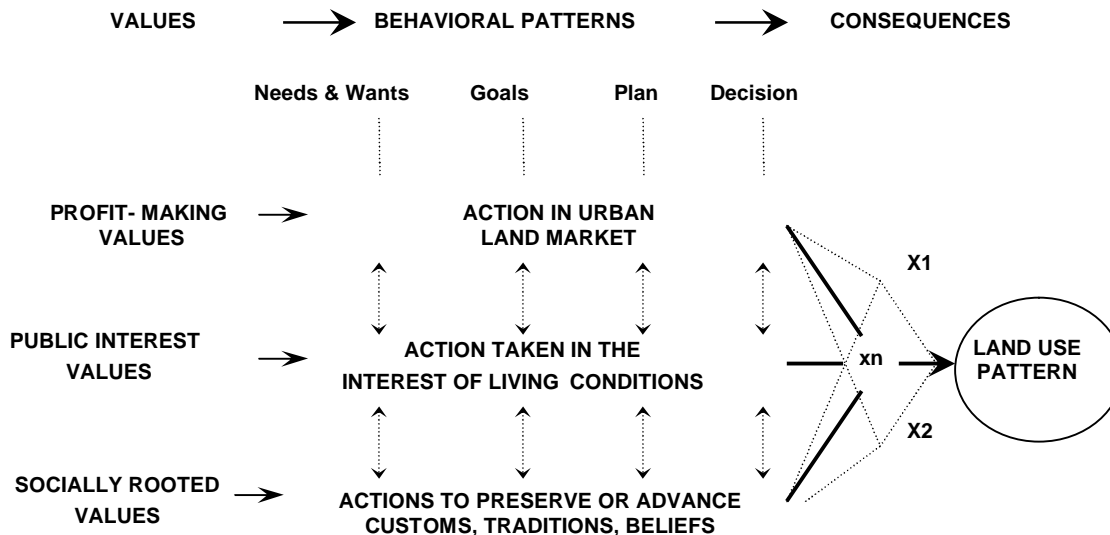
dan strategis yang diopsikan dalam artikel ini, jika kesuksesan menjadi tujuan dalam manajemen penggunaan lahan. Pertama mengidentifikasi beragam group kepentingan dengan karakter masing-masing; Kedua, menentukan mekanisme permainan yang mengikat setiap eksisting group; Ketiga, dibutuhkan suatu sistem manajemen yang mengatur perubahan tata guna tanah. Dengan mengadopsi hasil studi dari para ilmuwan seperti Chapin, Kaiser, Godschalk dan Rudel, ketiga point diatas akan dibahas lebih rinci pada bagian berikut ini.

### **1. Mengidentifikasi Kepentingan**

Menurut Chapin (1957) dalam mempelajari faktor-faktor penentu dalam tata guna tanah mengidentifikasi tiga kelompok besar yang berperan secara umum dan subsansial. Pertama, faktor ekonomi yang berorientasikan pada kepentingan *pengembangan modal finansial (profit making values)*. Kedua, faktor pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga *keberlangsungan hidup masyarakat umum (public interest values)*. Ketiga, faktor *nilai-nilai sosial* bertumbuh kembang di daerah dimana lahan itu berada (*socially rooted values*). Gambar 1 di bawah ini menggambarkan interkoneksi antar ketiga kepentingan dalam menentukan wujud serta pola pemanfaatan tanah di area tertentu. Secara ideal, sebelum pola tata guna tanah diputuskan, setiap kepentingan dengan segala perbedaan interest dan tujuan seharusnya berada pada titik keseimbangan.

Point  $X_1, x_2, \dots, x_n$  menunjukkan titik-titik dimana efek sampingan dalam pemanfaatan tanah yang memiliki kontribusi dalam perubahan tata guna tanah, mencapai keadaan seimbang dengan konsekuensi 1,2,...,n merupakan perubahan yang terjadi dalam proses ini.

Gambar 1. Hubungan antara faktor-faktor penentu dalam pemanfaatan lahan



Sumber: (Chapin 1957: 72)

Penulis melihat, Chapin telah melupakan satu influensial komponen dalam hal ini, yaitu kepentingan *politik* (*political interest*). Pada keadaan tertentu, kepentingan ini mutlak mempengaruhi setiap keputusan yang diambil. Entah itu menyangkut keberlangsungan kehidupan orang banyak atau mempertahankan eksisting negara itu sendiri. Menyadari pluraliti kedaerahan sebagai unsur pendukung terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), arah pembangunan di Bali (termasuk didalamnya perkembangan nilai-nilai sosial di masyarakat) pada porsi yang dominan diidentifikasi dan dicetuskan di tingkat pusat.

Selama enam dekade terakhir, dominasi ini malahan bersifat absolute (senang/tidak senang proyek yang disetujui oleh pemerintah pusat harus jalan terus). Secara nalar, Chapin kemungkinan menghilangkan *political values* karena secara prinsip politik suatu negara didedikasikan menjaga keberlangsungan hidup rakyatnya (*public interest values*). Tetapi hal ini tidak selalu benar. Kalau kerangka pemikiran Chapin hendak diterapkan di negara dengan praktek-praktek sentralisasi politik yang kental seperti Indonesia (Firman 1999, 2000, Faisal 2002), memberikan tempat khusus pada political interest menduduki posisi strategis, seperti

halnya ketiga faktor penentu yang telah diidentifikasi dari awal.

## 2. Aturan Pengikat Permainan

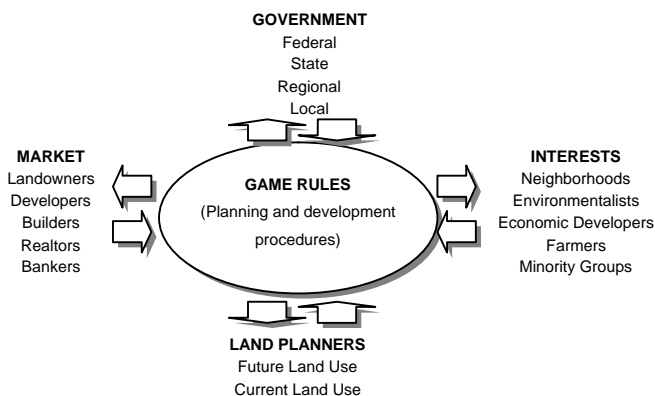
Bagaimana keseimbangan kepentingan dari keempat kelompok interest bisa dicapai merupakan pertanyaan yang belum diidentifikasi dalam konsep Chapin. Dari diagram diatas jelas didemonstrasikan bahwa setiap group memiliki kebutuhan, tujuan, rencana dan keputusan berbeda-beda. Nah bagaimana keanekaan ini bisa diantisipasi dalam kehidupan nyata merupakan langkah yang tidak kalah pentingnya dengan pengakuan akan adanya perbedaan kepentingan. Kaiser, Godschalk dan Chapin (1995) melakukan studi berkaitan dengan hal ini dan menuangkannya dalam suatu konsep yang dikenal dengan Teori Tentang Permainan (*Game Theory*). Hasil studi ini diorientasikan pada penemuan format dasar, dimana faktor-faktor penentu pola tata guna tanah dikonsepsualisasikan berada dalam suatu lingkungan untuk bersama-sama mengusahakan keseimbangan, disamping pada tujuan pemenuhan kebutuhan akan lahan. Teori selanjutnya mengungkapkan, setiap group kepentingan diikat oleh *Peraturan Permainan* (*Game Rules*) dalam konteks yang saling ketergantungan (*interdependant environment*), dimana persetujuan masing-masing pihak

dibutuhkan sebelum kepentingan individual salah satu group bisa direalisasikan.

Diakui bahwa pada kenyataannya setiap group tidak berada dalam hubungan yang harmonis, satu sama lain kemungkinan besar memiliki kepentingan yang berlawanan (*conflicting interests*). Dalam memenuhi kebutuhan akan lahan, setiap group dalam kompetisi ketat. Satu kelompok mungkin memperoleh keuntungan dari keputusan dan tindakan yang diambil kelompok lain. Dalam hal ini kemampuan mengantisipasi tindakan group lain untuk memperoleh peluang memenuhi kebutuhan kelompok sendiri menjadi penting (Rudel 1989). Disinilah peranan strategis yang ditawarkan aturan permainan dalam fungsinya menjadi juri sekaligus mediator yang mengatur serta menengahi kompetisi ini.

Gambar 2 dibawah ini mendemonstrasikan posisi sentral game rules dalam mekanisme perencanaan tata guna tanah termasuk perencanaan pembangunan daerah secara luas. Peranan perencana (*land planner*) dalam hal ini ditunjukkan sebagai satu kesatuan tersendiri, walau dalam banyak contoh (di berbagai negara di dunia) peran ini sering dirangkap oleh pemerintah. Atau kalau group ini tidak diwakili pemerintah, perencana biasanya berafiliasi dan terikat kontrak kerja dengan pemerintah untuk ikut serta dalam aktivitas perencanaan.

Gambar 2. Perencanaan Tata Guna Tanah: Stakeholders, Perencana, dan Aturan Permainan



Sumber: Kaiser, Godschalk and Chapin 1995: 7

Gambar 2 bisa diinterpretasikan sebagai berikut. Pemerintah memiliki peranan sebagai pengambil keputusan dalam penyusunan peraturan,

*decision maker, regulator*. Perencana berperan sebagai penengah konflik kepentingan dengan mengadopsi relevansi regulasi dan peraturan yang diproduksi pemerintah. Pendekatan dan solusi yang diajukan pihak perencana didasari pada keadaan pemanfaatan lahan yang ada pada saat perencanaan dilaksanakan dan diproyeksikan untuk kemungkinan eksisting keadaan di masa yang akan datang. Proses ini didasari pada beragam pertimbangan, seperti halnya sistem transportasi, kesempatan kerja, pertumbuhan penduduk dan faktor lainnya. Beranjak dari pengetahuan tentang mekanisme peran dalam *Game Theory*, potensial konflik kepentingan sebenarnya berada ditangan dua kelompok: kepentingan ekonomi (market) dan kepentingan di masyarakat (*public interests*).

Pada banyak kesempatan, tidak hanya terjadi di Bali, kepentingan ekonomi berpeluang besar mendominasi kepentingan masyarakat. Tetapi dengan menyimak fungsi yang diperankan perencana sebagai juri sekaligus penengah, group ini akan memiliki kemampuan expertise dan profesional memperkuat posisi lemah masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mempromosikan lingkungan terbangun yang secara tepat merangkul kepentingan ekonomi dan masyarakat dalam hasil perencanaannya. Ini bisa tercapai jika dan hanya jika pemerintah secara kooperatif menjalankan perannya sebagai delegasi masyarakat yang memproduksi aturan-aturan pengikat yang kondusif dan suportif. Keberadaan *lingkungan terbangun yang secara tepat* disini kedengaran diplomatis dan kurang definitif. Sehingga diperlukan penjelasan-penjelasan dan proses sosialisasi berkaitan dengan proposal pembangunan: apa yang akan dibangun, kapan akan dibangun, siapa yang akan dipengaruhi oleh pembangunan tersebut, efek sampingan dari pembangunan, solusi menanggulangi pengaruh negatif, tindakan preventif mencegah terjadinya dampak negatif, dan tindakan kuratif jika dampak yang tidak diinginkan benar-benar terjadi (Jacobs 1978, Lynch 1981, Calthorpe 1989, Beauregard 1990).

### 3. Perubahan Tata Guna Lahan dan Pembangunan Berkelanjutan

Perubahan pemanfaatan lahan tidak terlepas dari perkembangan suatu daerah menuju ke keadaan

yang lebih padat yang sering diidentifikasi sebagai perubahan menuju ke arah perkotaan (*urbanised area*). Secara umum, lawan perkotaan diistilahkan sebagai daerah pedesaan (*rural area*). Diakui atau tidak, tidak ada satu daerahpun yang tertutup akan perubahan. Lebih-lebih memasuki era abad ke-21, dimana interaksi dan komunikasi antar komponen-komponen pendukung wilayah satu dengan yang lainnya tidak lagi dibatasi jarak dan waktu. Batas-batas keruangan wilayah memudar seiring inovasi-inovasi teknologi dan sistem regulasi pendukung yang memungkinkan terjadinya percampuran sistem budaya yang tidak pernah terjadi sebelumnya, pemanfaatan berbagai penemuan baru, pemindahan modal, dan pergerakan sumber daya manusia (tenaga kerja). Lahan merupakan faktor produksi yang secara fisik tidak berpindah, tetapi eksistensinya dan pemanfaatannya ditentukan manuver-manuver yang diambil oleh beragam kepentingan dalam pembangunan, ekonomi, sosial dan politik. Semua ini mempercepat terjadinya proses perubahan (Waters, 2000).

Berkaitan dengan trend perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi di berbagai daerah, Rudel (1989) mengklasifikasikan daerah-daerah dalam tiga kelompok besar, yaitu:

- § Daerah pedesaan (*rural*) yang mengalami perubahan secara perlahan. Daerah ini memiliki jumlah penduduk yang relatif stabil dengan tingkat konversi lahan yang relatif rendah.
- § Daerah pedesaan (*rural*) yang berubah menjadi daerah perkotaan (*urbanized*) secara cepat. Daerah ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Kemungkinan untuk mencapai keseimbangan antar kepentingan semakin sulit. Peranan sistem regulasi, seperti halnya zoning dan tata ruang menduduki posisi krusial.
- § Daerah perkotaan (*urbanized*) yang berkembang secara perlahan. Daerah ini memiliki mekanisme dimana setiap komponen kepentingan secara aktif ambil bagian dalam mempertanyakan, mengkonsultasikan, kemudian memutuskan program pembangunan yang secara menyeluruh memiliki kontribusi positif, dan menentang praktek-praktek yang berpotensi merusak tatanan kehidupan secara mendasar.

Kebutuhan akan suatu sistem yang mengatur dan mengontrol perubahan-perubahan diatas adalah suatu keharusan. Keiser, Godschalk dan Chapin (1995) menawarkan dua model manajemen tata guna lahan:

1. Model yang merangkul kepentingan struktur lingkungan kehidupan hidup manusia (*human ecology*) dan politikal ekonomi dalam suatu konsep yang menggabungkan proses pengaturan pemanfaatan lahan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
2. Model yang merangkul konsep partisipasi dan pemecahan masalah (*discourse planning model*). Model ini tidak hanya mengakui kepentingan-kepentingan kelompok dominan yang telah disebutkan dalam *game theory*, tetapi juga memberi peluang kepada pihak perencana, tenaga ahli teknis dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya untuk berpartisipasi.

Gambar 3. Manajemen Perubahan Tata Guna Tanah sebagai Three-Legged Stool



Sumber: Kaiser, Godschalk, Chapin 1995:52

Gambar 3 merangkum konsep-konsep manajemen tata guna tanah yang ditawarkan model pertama, yang diberi nama Model Tiga Kaki (*Thre-Legged Stool*). Setiap kaki mewakili tiga kepentingan dominan dilapangan. Manajemen tata guna tanah akan merangkul ketiganya dan bersama-sama mendukung pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Model kedua, mengopsikan bahwa manajemen tata guna tanah akan sukses dalam perannya jika mampu mendorong pencapaian konsensus dan partisipasi masyarakat yang bergerak ke arah

tujuan yang diharapkan. Tetapi bukti di lapangan menunjukkan implementasi konsep semacam tidak selalu memungkinkan. Partisipasi melalui konsensus masyarakat memang penting tetapi itu belum cukup. Harus ada kepastian bahwa konsensus yang dicapai harus bersifat realistis dalam praktek dan implementasi. Godschalk dan Stiftel (1981) bahkan merinci lebih lanjut bahwa efektivitas konsensus bisa ditingkatkan jika semua group-group kepentingan dilibatkan di dalam proses pembentukannya, termasuk masyarakat, pemerintah, perencana, pemilik modal dan tenaga teknis.

### PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI BALI

Rumusan-rumusan komprehensif yang ditawarkan dari ketiga pokok pemikiran diatas diharapkan secara konseptual bisa dimanfaatkan sebagai acuan mendasar dalam pendekatan manajemen pembangunan keruangan di Bali. Beberapa poin pemikiran yang menonjol disini adalah, plurality kelompok-kelompok kepentingan dalam pembangunan (dimana pun) adalah kenyataan yang tidak terelakan. Tantangan yang ada adalah bagaimana menciptakan suatu sistem perencanaan yang akan mampu mengakomodasikan setiap kepentingan secara maksimal. Pada saat yang sama, tindakan nyata yang menumbuhkan kesadaran bahwa setiap kepentingan tidak bisa berdiri sendiri tetapi saling membutuhkan bahkan saling ketergantungan. Kesadaran ini merupakan langkah praktikal awal yang perlu ditanamkan. Dan ini merupakan syarat utama sebelum pengertian akan pembangunan berkesinambungan bisa dipromosikan, dipahami secara konsep dan secara nyata bisa diimplementasikan di lapangan dengan partisipasi yang tinggi oleh semua lapisan kepentingan di masyarakat (Taylor and Williams 1982, Torress 1993, Suartika 2005a, 2005b).

### Daftar Pustaka

Aditjondro, G J, 1995. *Bali, Jakarta Colony: Social and Ecological Impacts of Jakarta-Based Conglomerates in Bali's Tourism Industry* Working Paper No.58, Asia Research Center of Murdoch University.

- Bali Post, 22/08/2005. 'Geothermal Ramah Lingkungan, Bukan untuk Bali' in <http://www.balipost.co.id> diakses tanggal 22/08/2005.
- Beauregard, 1990. 'Bringing the City Back in' *Journal of the American Planning Association* 56 (2) pp: 210-14.
- Calthorpe, E., 1989. *The Pedestrian Pocket Book: A New Suburban Design Strategy* Princeton: Princeton Architectural Press.
- Chapin, F S, 1957. *Urban Land Use United Governments of America* (New York): Harper & Brothers Publisher.
- Faisal, B, 2002. *Decentralization and Spatial Planning in Indonesia* Doctorate Thesis, Melbourne (Australia): Fakultas Architecture, Building and Planning, Universitas Melbourne.
- Firman, T, 1999. 'Indonesian Cities under 'Krismon': A Great Urban Crisis in Souteast Asia Cities', *Cities* Vol. 6 No. 2, pp: 69-82.
- Firman, T, 2000. 'Land Development Permit System of Rural to Urban Conversion in Indonesia during Boom and Bust Periods' , *Land Use Policy* Vol. 17 No. 1, pp: 7-13.
- Godschalk, D R and B Stiftel., 1981. 'Making Waves: Public Participation in Government Water Planning' *Journal of Applied Bahvioural Science* 17 (4), pp: 597-614.
- Hall, E T, 1973. *The Silent Language Garden City*, New York: Anchor Press/Doubleday.
- Jacobs, A., 1978. *Making City Planning Works* Chicago (USA): Planners Press.
- Kaiser, E J, D R Godschalk, F S Chapin, 1995. *Urban Land Use Planning United Governments of America*: University of Illinois Press.
- Lynch, K, 1981. *A Theory of Good City Form* Cambridge: MIT Press.
- MacRae, G S, 1992. *Tourism and Balinese Culture* M.A. Thesis, University of Auckland.
- Magdoff, H, 1972. 'Imperialism without Colonies' dalam R Owen and B Sutcliffe (Ed.) *Studies in the History of Imperialism* United Governments of America, New York: Longman Inc.

- Mathieson, A dan G Wall, 1982. *Tourism, Economic, Physical, and Social Impacts* London: Longman.
- Mitchel, B (Ed.), 1995. *Bali: Balancing Environment, Economy and Culture* Canada: Department of Geography, University of Waterloo.
- Ricklefs, M C, 2001. *A History of Modern Indonesia since 1200* (3rd ed.) London: Palgrave.
- Rudel, T K, 1989. *Situations and Strategies in American Land Use Planning* Cambridge (England): Cambridge University Press.
- Suartika, G A M, 2005a. *The Vanishing Paradise: Planning and Conflicts in Bali* Doctorate Thesis, Sydney (Australia): Fakultas Built Environment. Universitas New South Wales.
- Suartika, G A M, 2005b. *DSDP, Denpasar Sewerage Development Project: Mega Proyek? Atau Penanganan Limbah? Kuta (Bali): Milis Bali in Danger.*
- Supatha, W (Ed.), 1998. *Baliku Tersayang Baliku Malang* Denpasar (Bali): Bali Post.
- Torres, J F, 1993. *New Directions for Development in Third World Countries* Great Britain: Avebury.
- Taylor, L J and Williams, D G, 1982. *Urban Planning Practice in Developing Countries* Oxford (England): Pergamon Press.
- Waters, M, 2000. *Globalization* (2nd ed.) London: Routledge.